

ACCOUNTABILITY OF GUIDANCE AND COUNSELING IN SCHOOL

Mita Anggela Putri¹, Neviyarni², Riska Ahmad³, Yarmis Syukur⁴

Program Studi Doktor Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang

E-mail: mitaangelaputri123@gmail.com

Abstract

This study discusses guidance and counseling accountability in schools so that school counselors can demonstrate their duties as instrumental personnel in achieving optimal student competencies. One model of accountability activities is the MEASURE model developed by Stone and Dahir (2016), as a six-step accountability process that helps school counselors to implement a component of accountability into counseling and guidance programs. The advice in this study is for school counselors to conduct In-Service Training to help them improve their skills in accountability.

Keywords: Accountability, MEASURE

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling (BK) diselenggarakan di sekolah adalah sebagai bagian bagian integral dari proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bimbingan dan konseling memiliki konsep dan peran yang ideal, karena pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Berfungsinya bimbingan dan konseling secara optimal maka semua kebutuhan dan permasalahan siswa di sekolah akan dapat ditangani dengan baik.

Guru BK/konselor sekolah sebagai pendidik di sekolah memiliki kinerja yang menunjang pencapaian tujuan yang dicanangkan oleh sekolah (Dahir & Stone, 2009). Sebagai sebuah profesi, BK menyadari bahwa profesionalisme adalah cara agar masyarakat memiliki kepercayaan dalam menggunakan jasa profesi BK (Badrujaman, Furqon, Yusuf, & Suherman, 2017). Efektivitas program dan intervensi konseling sekolah yang digunakan untuk memenuhi tujuan program harus didokumentasikan melalui kegiatan akuntabilitas yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, guru BK/konselor sekolah harus melakukan akuntabilitas dengan menunjukkan data sebagai bukti yang mendukung efektivitas program BK. Loesch (2007) mengemukakan bahwa agar bisa menunjukkan efektivitas program layanan konseling di sekolah yang bisa

diukur maka guru BK/konselor sekolah yang profesional perlu menghasilkan data yang dianggap sebagai indikasi keberhasilan dan/atau efektivitas konseling sekolah. Data digunakan untuk mengartikan berbagai jenis bukti, tidak hanya angka. Data dapat memberikan informasi tentang efektivitas kegiatan BK di sekolah melalui cara apa pun dan dalam bentuk apa pun yang paling sesuai dengan aktivitas, program, atau situasi. Dengan menganalisis dan memilah data dan memperoleh umpan balik *stakeholders* yang sesuai, guru BK/konselor membantu untuk memperjelas peran mereka dengan mengembangkan dan menerapkan strategi dan kegiatan yang efektif yang hanya dimanfaatkan oleh guru BK/konselor untuk mendukung siswa (Paolini & Topdemir, 2013).

Hasil penelitian Rhyne-Winkler & Wooten (1996) mengemukakan bahwa kebanyakan guru BK/konselor sekolah melaksanakan layanan berkualitas untuk meningkatkan kinerja akademik siswa. Namun, konselor gagal mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan bukti keefektifannya. Selanjutnya, Topdemir (2010) mengemukakan meskipun guru BK/konselor sekolah menyadari pentingnya menerapkan langkah-langkah akuntabilitas dan praktik yang disengaja, karena keterbatasan waktu, kebingungan peran, dan variabel lainnya, praktik ini jarang digunakan oleh guru BK/konselor sekolah daripada yang seharusnya. Sementara, saat ini, guru BK/konselor sekolah ditantang untuk menunjukkan efektivitas program konseling sekolah mereka dalam hal terukur dan menggunakan strategi akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja siswa dan menutup kesenjangan prestasi (Young & Kaffenberger, 2011).

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban konselor sebagai profesi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dari pelaksanaan program BK. Yusuf (2005:15) mengemukakan akuntabilitas BK adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi BK dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Apabila akuntabilitas BK dilakukan secara periodik dan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, sehingga keberadaan BK di sekolah menjadi kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan dalam pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Sink (2009) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas membantu meyakinkan siswa, orangtua, guru, administrator, dan masyarakat umum terhadap manfaat yang diperoleh dari kualitas program BK.

Jadi dapat dikatakan akuntabilitas BK merupakan satu kegiatan yang sangat penting untuk menyoroti kebutuhan dan efektivitas program BK, yang juga merupakan personil instrumental dalam pencapaian kompetensi optimal siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan dan selanjutnya supaya guru BK/konselor sekolah untuk terlibat dalam upaya akuntabilitas untuk meningkatkan layanan, untuk memberikan bukti efektivitas, dan untuk meningkatkan citra profesional (Fairchild & Seeley, dalam Wehrman, Williams, & Field, 2010).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akuntabilitas BK

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab moral para pengelola, pelaksana kegiatan BK dalam suatu unit atau organisasi terhadap semua *stakeholders* dan/atau pengguna jasa BK. Shertze & Stone (1989) mengemukakan bahwa akuntabilitas BK pertanggungjawaban guru BK/konselor terhadap kegiatan yang dilakukan kepada orang-orang yang dilayani dan membiayai pekerjaan dalam mencapai tujuan program BK.

Menurut Astramovich & Coker (2007) akuntabilitas mempersyaratkan adanya evaluasi program karena melalui evaluasi program guru BK/konselor dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik serta memperbaiki praktik BK. Akuntabilitas adalah cara dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak lain di sekolah serta masyarakat tentang efektifitas pelayanan.

Myrick (2011) mengemukakan bahwa akuntabilitas BK adalah bentuk pertanggungjawaban guru BK/konselor sekolah terutama terhadap tujuan, prosedur, dan hasil dari layanan/program yang telah dilakukan. Hal ini berkaitan tentang apa yang telah dilakukan termasuk informasi dan data yang dibuat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap diri sendiri atau orang lain. Kedua aspek tersebut relevan dengan program BK. Setiap konselor perlu mengajukan pertanyaan dasar: "apa tujuan saya? apakah saya efektif? apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan hal yang sama?"

Badrujaman, Furqon, Yusuf, & Suherman (2017) menjelaskan akuntabilitas BK adalah sebagai suatu keadaan dimana guru BK/konselor mampu menerima tanggungjawab, melakukan komunikasi, menjelaskan, menetapkan mekanisme umpan balik, serta melakukan perbaikan program bagi *stakeholders*.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas BK adalah pertanggungjawaban guru BK/konselor kepada *stakeholders* dan/atau pengguna

jasa BK untuk menunjukkan efektivitas program BK sekolah yang memberikan dampak positif bagi kehidupan siswa berdasarkan data. Akuntabilitas diintegrasikan ke dalam model untuk mendorong konselor menggunakan data untuk menunjukkan bagaimana siswa berkembang dan mendapat manfaat sebagai hasil dari program konseling sekolah. Sistem Akuntabilitas berfokus pada analisis data. Memiliki data sangat penting bagi konselor sekolah, karena mereka berkewajiban untuk menunjukkan efektivitas mereka dan menunjukkan bahwa layanan mereka memberikan hasil yang positif bagi siswa (ASCA, dalam Paolini & Topdemir, 2013)

Akuntabilitas tidak hanya melaporkan tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang telah guru BK/konselor lakukan, tapi juga mengenai bagaimana pekerjaan tersebut memberikan dampak positif terhadap penerima layanan, baik terhadap siswa secara langsung maupun terhadap seluruh pihak yang bekerja dalam pencapaian kompetensi optimal siswa. Untuk itu sebelum bekerja guru BK/konselor harus terlebih dahulu dapat mendefinisikan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, apa tujuannya, dengan cara apa dan bagaimana tujuan itu akan dicapai, apa tolak ukur pencapaiannya serta bagaimana mengukurnya.

B. Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu alat terbesar yang digunakan konselor untuk memperjelas peran profesional mereka. Melalui langkah-langkah akuntabilitas, guru BK/konselor akan mampu menunjukkan signifikansi mereka dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan akademis, pribadi / sosial, dan karir (Paolini, 2015).

Menggunakan praktik akuntabilitas dapat menghubungkan program konselor sekolah dengan pencapaian akademik semua siswa. Strategi akuntabilitas memiliki tiga tujuan: 1) untuk memantau perkembangan siswa dan menutup kesenjangan prestasi, 2) untuk menilai dan mengevaluasi program, 3) untuk menunjukkan efektivitas program konseling sekolah (Young & Kaffenberger, dalam Paolini, 2015).

Pine (Shertze & Stone, 1989) menambahkan bahwa akuntabilitas membantu guru BK/konselor memperoleh wawasan dan meningkatkan keterampilan konseling. Dengan melaksanakan akuntabilitas program, Pine percaya bahwa guru BK/konselor akan meningkatkan kompetensi dan akan mendapatkan bukti untuk mengetahui teknik konseling mana yang memberikan hasil yang bermanfaat. Selanjutnya, Gysbers (dalam Paolini, 2015) mengemukakan akuntabilitas adalah cara untuk meningkatkan kredibilitas guru BK/konselor sekolah dan sarana untuk menunjukkan efektivitas program BK sekolah.

C. Jenis Data Akuntabilitas

Asosiasi konselor sekolah Amerika Serikat (ASCA) menempatkan program bimbingan sebagai salah satu program bimbingan dan konseling yang memiliki peran penting dalam model BK yang direkomendasikan pada seluruh Negara Bagian di Amerika Serikat. Menurut Model ASCA Nasional (ASCA, 2005) bahwa data akuntabilitas yang harus ada adalah kinerja guru BK/konselor sekolah dan efektivitas program.

- 1) Evaluasi kinerja guru BK/konselor sekolah, khususnya dalam hal implementasi dan manajemen program, adalah penting karena berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan program BK sekolah yang disusun selanjutnya sehingga lebih sukses.
- 2) Evaluasi program BK sekolah sangat penting karena menentukan apakah kegiatan yang disusun bermanfaat bagi siswa.

Erford (2007) menambahkan dan menekankan *needs assessment* sebagai domain penting untuk akuntabilitas BK sekolah. Data *needs assessment* digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran program, yang pada akhirnya memandu dan membentuk fungsi dan kinerja konselor sekolah, dan menunjuk pada kriteria yang menjadi dasar program konseling sekolah.

Fezler & Brown (2011) bahwa data yang harus dikumpulkan untuk menunjukkan akuntabilitas program BK di sekolah adalah:

1. Hasil laporan

Hasil laporan memastikan bahwa program yang diterapkan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan BK yang dilakukan guru BK/konselor. Data yang dikumpulkan menunjukkan program dan kegiatan pekerjaan dan apa yang perlu ditingkatkan. Data hasil laporan yang harus dikumpulkan adalah: (a) Tingkat kelas dilayani, (b) bidang pengembangan, (c) bahan/sumber yang digunakan, (d) mengolah data seperti materi/topik yang disampaikan dan subjek ruangan kelas, (e) mengolah data seperti jumlah siswa yang dilayani, (f) data persepsi jangka pendek seperti pra-post test pengetahuan, (g) hasil laporan jangka menengah dan jangka panjang seperti kehadiran, nilai tes, tingkat kelulusan atau ukuran lain dari perilaku, (h) implikasi dari hasil program konseling

Selain itu, dampak dari hasil upaya tersebut akan dilacak dari waktu ke waktu dan dikompilasi untuk presentasi administrasi. Dalam laporan ini, demografi, tingkat kelulusan, disiplin dan kehadiran data, skor tes, dan data lainnya yang digunakan untuk mendokumentasikan kemajuan siswa dalam setiap domain konseling sekolah dan "analisis dalam kaitannya dengan kemajuan yang dibuat menuju misi sekolah dan tujuan pencapaian". Sebagai dokumen ringkasan, dampak selama waktu laporan berisi: (a)

Demografi Siswa, seperti data pendaftaran, jenis kelamin, etnis, tingkatan kelas, bahasa, (b) Data prestasi akademik, seperti nilai tes, rata-rata kelas, dan putus sekolah dan tingkat kelulusan, (c) Data pengembangan karir, seperti cita-cita, dan mentoring pekerjaan, atau jumlah siswa yang telah mengidentifikasi arah karir, (d) Data perkembangan pribadi/sosial, seperti data penggunaan narkoba, dan data kejahatan sekolah/kekerasan, (e)Induk dan keterlibatan wali: jumlah orang tua dikonferensi, lokakarya, dan acara.

2. Standar kinerja konselor sekolah

Standar kinerja konselor sekolah berisi standar dasar praktik yang diharapkan dari guru BK/konselor. Guru BK/konselor dievaluasi dalam implementasi program, evaluasi program, dan profesionalisme. Meskipun digunakan untuk evaluasi kinerja, standar juga merupakan instrumen penting dalam evaluasi diri guru BK/konselor sekolah dan akan membantu dalam memfokuskan rencana untuk pengembangan diri dan profesional. Ada 13 standar kinerja guru BK/konselor sekolah yaitu:

- a. Konselor sekolah profesional melakukan perencanaan, mengatur dan melaksanakan program konseling sekolah.
- b. Konselor sekolah profesional menerapkan kurikulum BK melalui metode pembelajaran yang efektif dan perencanaan yang cermat.
- c. Konselor sekolah profesional mengimplementasikan komponen perencanaan individual dengan membimbing siswa secara individu maupun kelompok dan orang tua atau wali siswa melalui pengembangan rencana pendidikan dan karir.
- d. Konselor sekolah profesional menyediakan layanan responsif melalui konseling individu dan kelompok kecil, konsultasi dan alih tangan kasus.
- e. Konselor sekolah profesional memberikan dukungan sistem melalui manajemen program konseling sekolah yang efektif dan dukungan untuk program-program pendidikan lainnya.
- f. Konselor sekolah profesional bekerja sama dengan administrator sekolah untuk membahas sistem manajemen program BK.
- g. Konselor sekolah profesional bertanggung jawab untuk membentuk dewan penasehat untuk program konseling sekolah.
- h. Konselor sekolah profesional mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyusun program BK.
- i. Konselor sekolah profesional memperhatikan secara kontiniu kemajuan siswa di sekolah.
- j. Konselor sekolah profesional menggunakan waktu dan kalender akademik untuk melaksanakan program yang efisien.

- k. Konselor sekolah profesional mengembangkan evaluasi hasil untuk program tersebut.
 - l. Konselor sekolah profesional melakukan audit program tahunan.
 - m. Konselor sekolah profesional adalah pendukung siswa, pemimpin, kolaborator dan agen perubahan sistem.
3. Audit Program

Audit program ini dirancang untuk digunakan dalam pengembangan pedoman yang komprehensif dan program konseling serta setiap tahun setelah program ini dilaksanakan. Tujuan penggunaan alat ini adalah untuk mendokumentasikan untuk evaluasi program dan perbaikan yaitu: menentukan kekuatan dan kelemahan program, dan merencanakan tujuan yang dibuat untuk tahun ajaran berikutnya.

D. Proses Akuntabilitas

Stone dan Dahir (2016) mengembangkan program MEASURE sebagai proses akuntabilitas enam langkah supaya guru BK/konselor sekolah dapat mengimplementasikan komponen akuntabilitas ke dalam program BK. MEASURE membantu guru BK/konselor untuk menetapkan tujuan pada awal tahun ajaran baru sekolah dan memungkinkan untuk menilai efektivitas kemampuan untuk mencapai tujuan ini pada akhir tahun ajaran, serta membuat guru BK/konselor tetap fokus dan di jalur. MEASURE adalah singkatan *Mission, Elements, Analyze, Stakeholders, Unite, Reanalyze, and Educate*. Langkah-langkahnya dijelaskan sebagai berikut.

1. *Mission*. Guru BK/konselor sekolah menyelaraskan program BK dengan misi sekolah dan tujuan dalam rencana perbaikan sekolah. Langkah ini akan membantu guru BK/konselor sekolah bisa dilihat sebagai bagian integral dari tim kepemimpinan sekolah.
2. *Elements*. Guru BK/konselor sekolah mengidentifikasi data mana yang relevan dan dikumpulkan. Guru BK/konselor sekolah dapat menggunakan data sekolah yang ada atau mengumpulkan data sendiri.
3. *Analyze*. Setelah elemen data terpilah, data harus dianalisis yaitu memeriksa data dengan cara yang berbeda, termasuk memilah data di seluruh elemen dan dengan karakteristik dan/atau situasi siswa.
4. *Stakeholders*. Guru BK/konselor sekolah harus mengidentifikasi *stakeholders* untuk membantu. *Stakeholders* yang bisa membantu dalam mengimplementasikan program BK adalah konselor sekolah, guru, administrator, psikolog sekolah, pekerja sosial sekolah, staf administrasi, orang tua, atau anggota masyarakat.

5. *Unite*. Langkah ini sebagai bersatu untuk menyusun strategi. Ini adalah langkah di mana rencana aksi dikembangkan. Rencana aksi harus mencakup hasil yang diinginkan, informasi apa yang diperlukan, strategi yang diperlukan, sumber daya yang dibutuhkan, siapa yang akan mengimplementasikan program BK.
6. *Reanalyze*. Langkah reanalyze memungkinkan guru BK/konselor sekolah untuk memeriksa apa yang berhasil dan apa yang perlu diubah atau dimodifikasi. Langkah ini juga memungkinkan guru BK/konselor sekolah untuk memfokuskan kembali pada program dan tujuan yang akan dicapai.
7. *Educate*. Guru BK/konselor sekolah mempublikasikan hasil dari program BK yang merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas. guru BK/konselor sekolah menginformasikan kepada *stakeholders*, termasuk siswa, tentang apa yang ditemukan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam program.

KESIMPULAN

Akuntabilitas BK adalah pertanggungjawaban guru BK/konselor kepada *stakeholders* dan/atau pengguna jasa BK untuk menunjukkan efektivitas program BK sekolah yang memberikan dampak positif bagi kehidupan siswa berdasarkan data. Akuntabilitas diintegrasikan ke dalam model untuk mendorong konselor menggunakan data untuk menunjukkan bagaimana siswa berkembang dan mendapat manfaat sebagai hasil dari program konseling sekolah.

Kegiatan akuntabilitas harus berdasarkan data sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas kegiatan BK di sekolah. Data yang harus dikumpulkan untuk menunjukkan akuntabilitas program BK di sekolah adalah hasil laporan, standar kinerja konselor sekolah, audit program. Salah satu model kegiatan akuntabilitas adalah model MEASURE yang dikembangkan oleh Stone dan Dahir (2016), sebagai proses akuntabilitas enam langkah yang membantu guru BK/konselor sekolah untuk mengimplementasikan komponen akuntabilitas ke dalam program BK. MEASURE adalah singkatan *Mission, Elements, Analyze, Stakeholders, Unite, Reanalyze, and Educate*.

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, sudah seharusnya seorang guru BK/konselor sekolah yang professional untuk melakukan kegiatan akuntabilitas untuk menunjukkan efektivitas program BK sekolah yang memberikan dampak positif bagi kehidupan siswa.

Hasil akuntabilitas akan memberikan umpan balik yang sangat berarti untuk perbaikan program BK kedepannya. Oleh karena itu, keterampilan dalam kegiatan akuntabilitas perlu untuk dimiliki oleh guru BK/konselor sekolah.

In-Service Training dapat dilakukan untuk membantu guru BK/konselor sekolah dalam meningkatkan keterampilan dalam melakukan akuntabilitas. In-Service Training ialah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan bidangnya masing-masing. In-Service Training merupakan suatu tuntunan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Astramovich, R. L. & Coker, J. K. (2007). The Accountability Bridge Model for Counselors. *Journal of Counseling and Development*, 85, 162-172.
- Badrujaman, A., Furqon, Yusuf, S., & Suherman. (2017). Pengaruh Model Evaluasi Layanan Dasar Berorientasi Akuntabilitas terhadap Peningkatan Akuntabilitas Guru BK SMP. *Jurnal Parameter*. 27 (2), 158-177.
- Dahir, C. A. & Stone, C. B. (2009). School Counselor Accountability: The Path to Social Justice and Systemic Change. *Journal of Counseling & Development*. 87.
- Dollarhide, C. T & Saqinak, K. A. (2008). *Comprehensive School Counseling Programs: K-12 Delivery System in Action*. America: Library of Congress Cataloging in Publication Data.
- Fezler, B & Brown, C. (2011). Sponsored by AASSA and the U.S. State Department Office of Overseas Schools. The International Model For School Counseling Programs.
- Loesch, L. C. (2007). Accountability for school counseling (ACAPCD-01). Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Myrick, R. D. (2011). *Developmental Guidance and Counseling: A Practical Approach*. Minneapolis: Educational Media Corporation.
- Paolini, A. C. (2015). Impact of Accountability Measures on Perceived Counselor Self-Efficacy and Student Outcomes. *VISTAS*.
- Paolini, A. C., & Topdemir, C. M. 2013. Impact of Accountability on Role Confusion: Implications for School Counselor Practice. *VISTAS*.
- Rhyne-Winkler, M. C., & Wooten, H. R. (1996). The school counselor portfolio: Professional development and accountability. *School Counselor*, 44(2), 146-150.
- Shertzer, B and Stone, S. C. (1989). *Fundamentals of counseling (third edition)*. U.S.A: Library of Congress Catalog.

DOI : [10.32505/enlighten.v1i2.731](https://doi.org/10.32505/enlighten.v1i2.731)

- Sink, C. (2009). School Counselor as Accountability Leaders: Another Call for Action. *Professional School Counseling*. 13 (2).
- Topdemir, C. (2010). School counselor accountability practices: Anationalstudy. *Doctoral Dissertation*. University of South Florida.
- Topdemir, C. M. (2010). School Counselor Accountability Practices: A National Study. *Scholar Commons Citation*.
- Wehrman, J. D., Williams, R. & Field, J .2010. Accountability Through Documentation: What Are Best Practices for School Counselors?. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ914267>.
- Young, A., & Kaffenberger, C. (2011). The Beliefs and Practices of School Counselors Who Use Data to Implement Comprehensive School Counseling Programs. *Professional School Counseling*. 15, 67–76.
- Yusuf, A. M. (2005). *Riset, Evaluasi dan Akuntabilitas dalam Bimbingan dan Konseling*. Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X ABKIN di Semarang 13-16 April 2005.